PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Faisol

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, 65144
Email : faisol713@gmail.com

ABSTRACT

Human Trafficking is a slavery in modern era. The crime of human trafficking is no longer a regional crime but has turned into a global crime. At first this type of crime is only committed by individuals but as the economic development and cooperation relations between countries, the crime trafficking in person develops both in quality and quantity. Following up the issue, constitution no. 21 of 2007 has been made concerning the Eradication of Trafficking in Persons. The corporation which is involved in human trafficking crime, the criminal responsibility and punishment may be imposed directly on corporations and/or to corporate administrators as organs conducting corporate activities.

Key words: *Human Trafficking, Corporate, Corporate administrators Criminal Liability*

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan sebuah perbudakan dizaman modern. Kejahatan perdagangan orang bukan lagi kejahatan yang bersifat regional melainkan telah berubah menjadi kejahatan yang bersifat global. Pada awalnya jenis kejahatan ini hanya dilakukan oleh perorangan namun seiring berkembangnya perekonomian dan hubungan kerja sama antar negara, kejahatan perdagangan orang mengalami perkembangan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Menidndak lanjuti permasalahan tersebut maka dibuatlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana Perdagangan orang maka untuk pertanggungjawaban pidana dan pembedanaannya dapat dijatuhkan langsung kepada korporasi dan/atau kepada pengurus korporasi selaku organ yang menjalankan kegiatan korporasi.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman korporasi memiliki peran yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya itu peranan dan jangkauan kegiatan korporasipun meliputi wilayah sangat luas bahkan terkadang melewati batas teritorial suatu negara. Mengingat peran dan pengaruh korporasi yang begitu besar maka

dalam perkembangan berikutnya banyak sekali perundang-undangan diluar KUHP yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum. Pengaturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum salah satunya adalah undang-undang perdagangan orang. Suatu tindak perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi

apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.¹ Pasal 13 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:²

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Sanksi pidana tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang ketika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Melainkan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Begitu juga apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka untuk penjatuhan pidana pada korporasi terlebih dahulu kedua syarat tersebut harus terpenuhi.

Selain itu untuk pertanggungjawaban terkait tindak pidana perdagangan orang dapat juga dilimpahkan kepada pengurus korporasi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan UU PTPPO pasal 13 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Ketentuan pasal 13 ayat (2) belum menyebutkan secara jelas mengenai siapa pengurus yang dimaksud, begitupula pada bagian penjelasan, dalam penjelasan pasal 13 hanya terdapat keterangan cukup jelas. Hal ini akan menimbulkan kekaburan hukum, dalam sebuah korporasi terdapat beberapa organ, yang mana organ-organ tersebut adalah sebuah kesatuan dan saling bekerjasama untuk menjalankan sebuah korporasi. Korporasi sebagai sebuah perseroan memiliki dua badan (*the dual board structure*), yaitu direksi dan komisaris. Tentu selain kedua badan tersebut ada pemegang saham yang dapat mengambil keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Luar

¹ Sudarto, (1985), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 51.

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Biasa Pemegang Saham (RULBPS).³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa organ dalam perseroan terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi, dan;
3. Dewan Komisaris

Setiap organ-organ tersebut menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan dari korporasi.

Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ mempunyai tugas wewenangnyanya sendiri-sendiri menurut undang-undang dan anggaran dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Sekalipun Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, namun pengangkatan disini bersifat sepihak, sebab pengangkatan adalah perintah untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diatur dalam ketentuan anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, kewenangan yang dimiliki Direksi tidak diperoleh dari RUPS melainkan bersumber dari UUPT.⁴ Direksi merupakan organ yang

menahkodai roda pergerakan sebuah korporasi, direksi berperan mewakili dan bertindak atas nama korporasi baik dalam urusan yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Pasal 1 angka 5 UUPT menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Meskipun pihak direksi memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan kegiatan operasional sebuah korporasi namun dalam melaksanakan tugasnya pihak direksi tidak sepenuhnya terbebas dari intervensi pihak lain terutama pemegang saham. Sehingga hal itu bisa mengakibatkan pihak direksi tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan korporasi terkadang dewan direksi harus menyimpangi ketentuan yang berlaku hanya untuk keuntungan sebagian kelompok.

Agar sebuah korporasi dapat beroperasi sebagaimana mestinya haruslah tersedia

³ Todung Mulya Lubis, *Menuju Good Corporate Governance (1)*, <http://Hukum line.com/Baca/Hol2593/Menuju-Igoud-Corporate-Governance-I>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

⁴ Veronica Tampubolon, (2010), *Pertanggungjawaban Perbuatan Hukum Perseroan yang Dimuat Dalam Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 90.

keuangan yang cukup disamping kepengurusan yang terampil. Tanpa adanya modal yang memadai pelaksanaan kegiatan sebuah korporasi pastilah terganggu, untuk itu adanya peran pemberi modal sangatlah penting. Pemegang saham merupakan penyedia modal yang utama dalam operasional sebuah korporasi, sehingga kedudukan pemegang saham memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan oleh direksi untuk mencapai tujuan korporasi yang bersifat *profit oriented*. RUPS sebagai lembaga atau wadah berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Keputusan RUPS yang dihasilkan ibarat undang-undang, karena mengikat organ perseroan lainnya (Direksi dan Komisaris) yang wajib dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Siapakah yang dimaksud pengurus dalam ketentuan pengaturan tindak pidana perdagangan orang? Kapan suatu tindak pidana perdagangan orang dinyatakan dilakukan oleh pengurus?

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun teori-teori hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, dalam hal ini khususnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.⁷ Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan undang-undang) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Kasus). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

Makna Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kejahatan korporasi dalam arti normatif, adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum maupun badan usaha perseroan,

⁵ Gatot Supramono, (2007), *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63.

⁶ Petter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukum) oleh negara berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Kejahatan korporasi senantiasa terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum, sebagai badan hukum atau badan usaha dengan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Demikian pula halnya, korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai ketentuan hukum dalam perundang-undangan.

Pada awalnya unsur kesalahan dalam sebuah tindak pidana hanya melekat pada orang yang melakukan perbuatan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila orang tersebut tidak terlibat langsung dalam sebuah tindak pidana. Namun dalam perkembangan hukum pidana hal tersebut tidak berlaku lagi, meskipun seseorang tidak secara langsung melakukan perbuatan atau tindak pidana. Tidak hanya itu dalam hubungan yang lebih kompleks suatu instansi atau korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas

kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh:⁸

- a) Pemidanaan orang saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi, korporasi dan pengurus korporasi, atau pengurus saja;
- b) Dalam kehidupan sosial ekonomi korporasi semakin memainkan peranan yang penting;
- c) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada didalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidaklah efektif. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk sekali menentang dapat dipidananya korporasi.
- d) Pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan teori *vicarious liability*, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arif⁹ adalah pertanggungjawaban pengganti terkait dengan kesalahan yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan orang lain. Kemudian teori *vicarious liability* sebagaimana yang dikemukakan Micael J Allen¹⁰, adalah majikan

⁸ Setiyono, (2005), *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, (cetakan ke-5), hlm. 10

⁹ Dwidjo Priyatno, (2004), *Kebijakan Legalisasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, hlm. 100

¹⁰ Michael J. Allen, (____), *Textbook on Criminal Law* (Gread Briatin: Black Stone Press, 1997, page. 209) Dwidjo Priyatno *ibid.* lihat juga Hamzah Hatrik, *Op. Cit.* hlm. 81-85

yang bertanggung jawab atas tuntutan pada karyawannya yang bertindak dalam kerangka kerja majikan.

Pembaruan hukum pidana terkait teori *vicarious liability* yang dirumuskan dalam RUU KUHP, antara lain:

Pasal 38 (2)

“dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan orang lain.”

Penjelasan pasal 38 (2)

“ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tindak pidana tanpa kesalahan. Lazimnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya dalam batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai pertanggungjawaban mutlak atau *vicarious liability*.”

Istilah korporasi terkait dengan segala sesuatu yang tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut Mollengaf¹¹ adalah suatu korporasi (perusahaan) harus mempunyai unsur-unsur:

- a) Terus menerus atau tidak putus;
- b) Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
- c) Dalam kualitas tertentu;
- d) Menyerahkan barang;
- e) Mengadakan perjanjian dagang;
- f) Harus bertujuan memperoleh keuntungan

Berbagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik negara yang diatur dalam intruksi presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang pengarah dan penyederhanaan perusahaan negara dalam tiga bentuk usaha negara: peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara; dan undang-undang nomor 9 Tahun 1990 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang meliputi:

- a) Usaha-usaha negara melalui perusahaan jawatan atau *Public Service*
- b) Usaha negara melalui perusahaan umum atau *Public Corporation*

¹¹ CST Kansil, (1985), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1

c) Usaha negara melalui perusahaan perseroan atau *Public/State Company*

Kemudian, berbagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik, yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu, sebagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik negara berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Perusahaan perseroan
3. Perusahaan perseroan terbuka

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, belakangan ini telah banyak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat peranan korporasi yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat maka sudah selayaknya bila korporasi ditempatkan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perumusan undang-undang akan memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

ketika hak-hak mereka terganggu akibat kegiatan dari sebuah korporasi. Namun meskipun demikian, dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pengakuan korporasi sebagai subyek hukum. Agar pelaksanaan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya ketentuan khusus yang harus diatur dalam suatu undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana setidaknya harus berisi mengenai:¹²

- a) Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
- b) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki pembagian tersendiri karena dalam UUTPPO korporasi yang diakui sebagai subyek hukum tindak pidana tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum melainkan juga korporasi yang tidak berbadan hukum. Sebelum menjelaskan pengertian keduanya, suatu badan usaha dapat dilakukan oleh

¹² Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 151.

perseorangan atau beberapa orang sebagai suatu perkumpulan. Perkumpulan berarti kumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan disini mempunyai arti luas dan mempunyai empat unsur yaitu:¹³

1. adanya unsur kepentingan bersama
2. adanya unsur kehendak bersama
3. adanya unsur tujuan
4. adanya unsur kerjasama yang jelas

Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk usaha yang berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tampak sekali dari prosedur pendirian badan usaha tersebut dan kepengurusan didalamnya. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Perdata).

Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korporasi sebagai Subyek Hukum yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, begitu juga apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka untuk penjatuhan pidana pada korporasi terlebih dahulu kedua syarat tersebut harus terpenuhi.

1) Adanya Unsur Kesalahan Pada Korporasi

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat hubungannya dengan kesalahan, karena unsur kesalahan merupakan faktor penentu mengenai dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:¹⁴

- a) Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b) Kesalahan (*schuld*); dan
- c) Pidana (*strafe*).

Berdasarkan pasal diatas telah disebutkan bahwasanya unsur kesalahan merupakan faktor yang fundamental sekaligus faktor yang menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan apabila unsur kesalahan ini tidak terpenuhi.

¹³ Richard Burton Simatupang, (2007), *Aspek Hukum Bisnis* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 10

Sudarto menyatakan bahwasanya unsur-unsur kesalahan terdiri dari:

- a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b) Hubungan batin dan pembuatnya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c) Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi unsur kesalahan atau *mens rea* sulit dibuktikan karena subyek hukum korporasi itu sendiri tidaklah sama dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran. Berkaitan dengan hal ini ada seorang ahli hukum yaitu Suprpto memberikan pendapat bahwasanya korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya, kesalahan tersebut bukan bersifat individu akan tetapi kolektif, hal itu dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam rangka memberikan keuntungan bagi korporasi.¹⁶

Berdasarkan pendapat diatas, unsur kesalahan tidak lagi dipandang sebagai kesalahan yang bersifat individual dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh masing-masing person yang menjadi

perlengkapan korporasi. Melainkan unsur kesalahan tersebut secara kolektif merupakan perbuatan dari setiap individu perlengkapan korporasi yang mengakibatkan kerugian.

2) Adanya Unsur Kemampuan Bertanggung jawab Korporasi

Adanya kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada seseorang tersebut tidak ada kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana keduanya merupakan bentuk-bentuk dari kesengajaan.

Kemampuan bertanggung jawab dengan kesalahan merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, keduanya merupakan unsur yang bersifat komulatif sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatan tersebut telah terbukti melawan hukum. Bagaimana

¹⁵ Sudarto, *Op cit*, hlm. 91

¹⁶ Suprpto, (1963), *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta, hlm. 37

mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan dan kealpaan dalam perbuatan seseorang apabila pada diri seseorang tersebut tidak ada kemampuan bertanggung jawab, dan bagaimana mungkin pula dapat menentukan alasan pemaaf apabila seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab pada dirinya.

KUHP yang merupakan buku induk peraturan pidana tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggung jawab, melainkan dalam ketentuan KUHP tersebut memberikan pengertian secara negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan Pasal 44 ayat (1) disana menyebutkan:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Berdasarkan perumusan pasal diatas kemampuan bertanggung jawab erat hubungannya dengan akal sehat manusia. Seseorang yang akalnya tidak sehat maka hilanglah kemampuan bertanggung jawab pada diri seseorang tersebut, sehingga dalam keadaan seperti ini tidak mungkin dijatuhkan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan

seseorang tersebut, meskipun dalam kenyataannya perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab akan mengakibatkan tidak dapatnya dijatuhkan pemidanaan terhadap seseorang, hal ini dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana harus ditentukan kesengajaan atau kealpaan yang mana kedua hal ini merupakan bentuk kesalahan.

Meskipun dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggung jawab namun dalam beberapa literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat ahli mengenai kemampuan bertanggung jawab ini. Menurut Simon kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari sisi orangnya. Seseorang yang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a) Dia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Dia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁷

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 77

Bila dilihat secara seksama dalam pendapat Simon sebagaimana disebutkan diatas. Ada dua poin penting yang menjadi unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu, pertama pengetahuan dan kesadaran dari seseorang dan yang kedua adalah kehendak. Seseorang yang berakal sehat maka dia akan mengetahui dan dapat menentukan bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

Bila perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum maka secara penuh kesadaran dia akan menghindari perbuatan tersebut. Selanjutnya mengenai kehendak, hal inilah yang menjadi dasar penyesuaian perilaku seseorang, adanya kehendak yang kuat akan menjadi faktor seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Selain itu bila dilihat dari arah kebijakan formulatif terkait kemampuan bertanggung jawab, juga belum dirumuskan definisi dari kemampuan bertanggung jawab melainkan hanya merumuskan kriteria atau keadaan seseorang yang digolongkan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab.¹⁸ hal itu bias dilihat dalam perumusan Pasal 40 Rancangan KUHP Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau

retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenai tindakan.”

Kemudian dalam Pasal 41 Rancangan KUHP Tahun 2015 menyebutkan:

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental pidananya dapat dikurangi atau dikenai tindakan.”

Perumusan dua pasal diatas hanya menjelaskan kriteria dari orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dapat dikatakan kriteria mampu atau tidaknya seseorang bertanggung jawab ditentukan oleh aspek-aspek kejiwaan yang melekat pada orang tersebut. Apabila kejiwaan seseorang sedang normal atau sehat maka secara otomatis orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, hal itu dikarenakan dengan adanya kejiwaan yang normal dan sehat maka seseorang dapat membedakan antara mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang.

Ketika sebuah kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh seseorang maka dalam menentukan kemampuan pertanggung-jawaban pidananya itu merupakan hal yang sederhana, hal itu bias dilihat dari kondisi kejiwaan ataupun akal orang tersebut. Ketika kondisi kejiwaannya normal maka unsur

¹⁸ Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 37

kemampuan bertanggung jawab pada orang tersebut telah terpenuhi dan proses pembedaanpun bias dilanjutkan.

Namun lain halnya apabila kemampuan bertanggung jawab tersebut dihubungkan dengan korporasi. Ketika korporasi yang melakukan sebuah kejahatan masih relevankah unsur kemampuan bertanggung jawab ini dalam proses pembedaan.

Permasalahan ini merupakan hal cukup rumit karena dalam KUHP masih belum mengatur mengenai kriteria kemampuan bertanggung jawab dari korporasi. Selain itu dalam menentukan sebuah kemampuan bertanggung jawab erat sekali hubungannya dengan akal atau kejiwaan, sedangkan korporasi merupakan sebuah subyek hukum yang tidak memiliki akal atau kejiwaan layaknya manusia alamiah.

Terkait permasalahan diatas hal itu dapat diatasi apabila dalam pembedaan tersebut diterapkan konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*). Menurut Wolter, sebagaimana dikutip oleh Sahetapy, kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman.

Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pembedaan-nya memenuhi persyaratan dari masyarakat.

Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain.¹⁹

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dijadikan dasar dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori tersebut antara lain:

1) Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Identification Theory atau Teori Identifikasi merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana. Meskipun pada dasarnya korporasi tidak bias melakukan suatu perbuatan dan korporasi tidak memiliki sikap batin seperti halnya manusia, namun dalam perkembangan hukum, khususnya teori-teori pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana.

Hal ini mengingat secara tradisional pertanggungjawaban pidana tetap mempersonalkan pembuktian kesalahan (*proof of criminal guilt*) dalam kaitannya dengan “*intended something or knew*

¹⁹ Setiyono, *Ibid.*, hlm. 38

something” dari korporasi, maka Viscount Haldane menemukan “*Theory of Primary Corporate Criminal Liability*” yang kemudian dikenal dengan *Identification Theory* atau *Alter Ego Theory*.²⁰

Teori identifikasi atau pertanggungjawaban pidana langsung adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri karena ia bertindak untuk dan atas nama korporasi, dengan demikian perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

Menurut C.M.V Clarkson, perbuatan dan sikap batin seorang senior dalam suatu struktur perusahaan atau korporasi diidentifikasi (dipersamakan) sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi.

Tanggung jawab korporasi tersebut langsung, seolah-olah mewakili korporasi. Korporasi bertanggung jawab atas tindak

pidana yang dilakukan pejabat senior di dalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi korporasi.

Dengan demikian teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh buruh atau karyawan atau agen yang tidak mempunyai status pejabat senior, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.²¹

Tetapi mengenai penentuan kapan suatu perbuatan dan sikap batin seseorang yang dapat diambil alih menjadi perbuatan dan sikap batin korporasi adalah tergantung keadaan dan fakta yang terjadi sesungguhnya. Namun demikian tidak setiap sikap batin atau kehendak direktur atau manajer selalu menjadi sikap batin atau keinginan korporasi.

Ada pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan Michael J. Allen bahwa korporasi hanya bertanggung jawab jika orang yang diidentifikasi sebagai korporasi bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang itu dalam kapasitas pribadinya.

²⁰ Setiyono, (2005), *Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 84.

²¹ Setiyono *Ibid.*, hlm. 86.

Hal ini berarti bahwa batas-batas pertanggungjawaban korporasi itu adalah selama orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi itu juga dalam kewenangan yang dimiliki oleh orang yang berbuat tersebut.

Dalam penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa menurut Teori Identifikasi, perbuatan dan sikap batin korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah perbuatan sikap dan batin dari orang-orang yang diidentifikasi atau dipersamakan atau dipersonifikasikan dengan korporasi atau yang disebut sebagai *directing mind* korporasi. *Directing Mind* korporasi ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan / otoritas dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan korporasi.²²

2) Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability atau teori pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain. Teori atau doktrin pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum

yang didasarkan pada doktrin *The Respondeat Superior* dengan *the servant* atau antara *principal* dengan *agent*.

Menurut teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Teori ini umumnya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus bertanggung jawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi.

Oleh karena itu *Vicarious Liability* ini sering juga disebut sebagai *The Respondeat Superior*. Menurut pendapat Cristina de Maglie teori ini diterapkan dalam hukum di Amerika. Ia mengatakan dalam pendapatnya, perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seorang individual yang bertindak untuk dan atas nama korporasi secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan korporasi. Ketentuan ini memerlukan beberapa syarat. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana apabila:²³

1. Agen korporasi melakukan kejahatan;
2. Ketika bertindak dalam ruang lingkup kepegawaian/pekerjaan;
3. Dengan tujuan untuk keuntungan korporasi.

²² Setiyono, *Ibid.* hlm. 90.

²³ Setiyono, *Op cit*, hlm. 77

Berbeda dengan Cristina de Maglie, Gregory L. Diskant mengungkapkan terkait dengan *respondeat superior*. Pertama, undang-undang membatasi agen korporasi yang bertindak dapat menciptakan pertanggungjawaban pidana. Kecuali apabila badan pembentuk undang-undang menentukan undang-undang khusus secara langsung dengan teras terang pada kejahatan korporasi, kejahatan harus disahkan, perbuatan atau tindakan secara serampangan yang dilakukan oleh *a high managerial agent*, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab bahwa perbuatannya dapat diasumsikan mewakili kebijakan korporasi. Kedua, suatu perbuatan tidak dianggap dalam ruang lingkup pekerjaan jika korporasi melakukan pencegahan dengan sungguh-sungguh terhadap perbuatan melanggar hukum.

Namun antara keduanya memiliki kesamaan yaitu sehubungan dengan tindak pidana harus dilakukan oleh korporasi dan ketika seseorang tersebut bertindak dalam ruang lingkup kepegawaian/pekerjaan. Hal ini berarti bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana dan hal tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya maka korporasi dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.²⁴

KESIMPULAN

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam ketentuan UU PTPPO berimplikasi bahwasanya ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya bisa dijatuhkan kepada korporasi secara langsung maupun terhadap pengurusnya. Pengurusan disini yang dimaksud adalah pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur kepengurusan korporasi, dan dia memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili peran sebuah korporasi. Korporasi disini tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum tetapi juga korporasi yang tidak berbadan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi apabila saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang pengurus tersebut menduduki jabatan fungsional suatu korporasi. Baik dia seorang direktur, manager, sekretaris atau petugas lainnya yang sejenis dari korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau dia bertindak dalam kapasitas tersebut, atau berada sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan salah satu urusan korporasi tersebut, atau sedang membantu dalam manajemen tersebut, dinyatakan bersalah, kecuali jika ia membuktikan bahwa

²⁴ Setyono, Ibid., hlm. 78

pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, (2008) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Dwidjo Priyatno, (2005), *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung; Utomo.
- Gatot Supramono, (2007), *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta; Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Edisi Revisi), Jakarta, Pranada Media Group.
- Petter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Richard Burton Simatupang, (2007), *Aspek Hukum Bisnis* (Edisi Revisi), Jakarta; Rineka Cipta.
- Setiyono, (2005), *Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam*

Hukum Pidana Indonesia, (cetakan ke-5), Malang Bayumedia Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Internet

Todung Mulya Lubis, *Menuju Good Corporate Governance (I)*, <http://Hukumline.com/Baca/Hol2593/Menuju-Igood-Corporate-Governance-I>. Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2016

Lain-lain

Veronica Tampubolon, *Pertanggungjawaban Perbuatan Hukum Perseroan yang Dimuat Dalam Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 90.